

Budaya Transaksional dalam Kelas Menengah, Diametral Pilihan antara Idealisme dan Pragmatisme (dalam Perspektif *Sociological Imagination* C.Wright Milss)

Arie Wahyu Prananta, Zainal Abidin

Sosiologi FISIB-Universitas Trunojoyo Madura, Psikologi FISIB-Universitas Trunojoyo Madura

ariewahyu@gmail.com

Abstract

This article is to understand, analyze and interpret the movement diametrically space between idealism and pragmatism transaksionalisme cultural anti middle class groups conducted by using sociological perspectives Imagination C. Wright Mills. This article tries to find that the room is diametrically between idealism and pragmatism that appeared in diametraletis middle class anti-culture transaksionalisme get that high integrity to break away from the role of private and public roles, venue selection in anti culture transaksionalisme so they choose a place that can accommodate their anti-mainstream and dare to get out of your comfort zone, to change the system, although the risk will become a person who alienated, unpopular and always in solitude space. Diametric between idealism and pragmatism and for groups in the area of anti-culture transaksionalisme lighter because dilemma ethical in the role of his own, while a group in the area of power and politics is heavier because some can only see and experience the shock remarkable to stress but do not have the power to report it, some others even splashed in the cultural world transaksionalisme.

Keywords: *Idealism, Pragmatism, diametraletis, sociological imagination*

Abstrak

Artikel ini memahami, mengkaji dan memaknai gerakan ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme anti budaya transaksionalisme yang dilakukan kelompok Kelas menengah dengan menggunakan perspektif *sociological imagination* C. Wright Mills. Artikel ini mencoba menemukan bahwa ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme yang muncul dalam diametraletis Kelas menengah anti budaya transaksionalisme mendapatkan bahwa integritas yang tinggi untuk melepaskan diri dari peran pribadi dan peran publik, pemilihan tempat dalam gerakan anti budaya transaksionalisme sehingga mereka memilih tempat yang dapat mewedahi pemikiran mereka yang *anti mainstream* serta berani untuk keluar dari zona nyaman, untuk mengubah sistem tersebut, meskipun beresiko akan menjadi pribadi yang terasing, tidak populer dan selalu berada dalam ruang kesendirian. Diametral antara idealisme dan pragmatisme dan bagi kelompok yang ada di area gerakan anti budaya transaksionalisme lebih ringan karena dilema etisnya ada di peran pribadinya, sedangkan kelompok yang ada di area kekuasaan dan politik lebih berat karena sebagian hanya bisa melihat dan mengalami kekegatan yang luar biasa sampai *stress* tapi tidak punya kekuatan untuk melaporkannya, sebagian yang lain malah tercebur pada dunia budaya transaksionalisme.

Kata kunci: *Idealisme, Pragmatisme, Diametral, Imajinasi Sosiologi*

PENDAHULUAN

Perjalanan cukup panjang dan jauh bagaimana mendefinisikan siapakah kelas menengah di Indonesia, cukup banyak beberapa kajian yang sudah menjelaskan kelas menengah dari sisi analisis peran kelas menengah. Persaingan serta perebutan akses ekonomi dan kekuasaan menjadikan tumbuhnya budaya transaksionalisme di golongan kelas menengah. Lebih jauh budaya transaksionalisme kelas menengah muncul sebagaimana bentuk integrasi komunikasi dan rasionalisme pilihan peran ekonomi dan politik serta kekuasaan diungkapkan oleh Mills dalam karya bukunya tentang power elite dan struktur kekuasaan di Amerika Serikat pasca perang dingin, dimana kelompok kelas menengah ini menjadi penasihat Gedung putih dan Dephan (Pentagon) Amerika Serikat waktu itu (Wright Mills 2014). Bahkan lebih jauh Mills memberikan kritik tajam bahwa ada seorang laksaman dan juga seorang banker di salah satu bank yang terkenal.

Bagaimana dengan di Indonesia?, mengutip apa yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters dalam karya *the Rise of Capital*, 1988. Tumbuhnya kelas menengah di Indonesia didorong dengan semakin luasnya kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih layak, peningkatan yang signifikan kepemilikan kendaraan bermotor baik mobil dan motor, serta kepemilikan perumahan yang sangat layak dihuni, tumbuhnya tabungan investasi dalam bentuk asuransi diperuntukkan untuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua serta tumbuhnya sektor pariwisata yang banyak sekali pilihan ditunjang oleh kemajuan media sosial (Jeffrey Winters 1988). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Jeffrey Winters ini sepertinya diperkuat oleh Bambang Sumantri Brodjonegoro tahun 2018 dalam sebuah paparan ilmiah di FE-UI Depok, beliau menggambarkan terjadinya kenaikan yang sangat signifikan dari pendapatan US\$ 3,78

menjadi US\$19,794 dari tahun 2016-2018, selanjutnya Bambang Sumantri Brodjonegoro juga meramalkan kelas menengah ini menguasai perkonomian real di Indonesia. Bonus demografi yang dirasakan rakyat Indonesia sekarang ini adalah buah dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Penggelembungan sebaran jumlah penduduk seperti periuk tanah liat membawa konsekuensi pada permasalahan politik dan kekuasaan.

Sementara itu Mangunwijaya (Wijaya, 1986) juga menyebutkan beberapa tipe kaum Kelas menengah yang ada di Indonesia antara lain terdapat 5 golongan kaum Kelas menengah (1) Golongan kaum Kelas menengah yang memiliki ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme dalam mengutarakan kejujuran dan kebenaran dalam berpendapat walaupun berhadapan dengan maut, (2) Golongan kaum Kelas menengah ini adalah golongan yang memiliki ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme dalam mengutarakan kebenaran dan kejujuran tetapi tidak berani berhadapan dengan maut, ketika dipaksa untuk tidak mengakui kebenaran golongan ini mau mengakui ketidakbenaran, walaupun di belakang bergerak dan berbisik melawan ketidakbenaran, (3) Golongan kaum Kelas menengah yang memiliki ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme yang mengikuti arus seperti misalnya melawan ketidakbenaran dan kejujuran tetapi tidak punya keinginan dan ambisi untuk merubah keadaan dan tetap netral saja, (4) Golongan kaum Kelas menengah yang sering berbuat onar dan rusuh serta mengutarakan hal-hal yang sangat kritis terhadap penguasa walaupun golongan kaum Kelas menengah ini merasa sungkan atau tidak enak dengan penguasa setempat, tetapi ketika di beri kekuasaan dan jabatan menjadi penguasa yang “gendut dan berkepala botak” tunduk pada pemberi jabatan, (5) Kaum Kelas menengah golongan ini sama sekali tidak bisa

berpikir logis dan kritis dalam mengungkap ketidakbenaran serta tidak mampu memelopori perubahan dalam melawan ketidak benaran, seperti dalam ungkapan golongan yang dengan ungkapan disebut sebagai golongan kaum Kelas menengah “kemana jas dan dasi melambai tertiuip angin”, maka disitulah kaum Kelas menengah ini berlabuh”.

Heriyanto dan Hadiz (Heryanto, A. & Hadiz, V.R. 2005) melakukan Artikel di ASIA yang meliputi negara berkembang Indonesia, Philipina dan Thailand. Disitu disebutkan bahwa kaum Kelas menengah di Indonesia, berangkat dari kebangkitan peran Kelas menengah tentang gerakan anti budaya transaksionalisme saat pasca reformasi, dimana setelah pasca reformasi tahun 1998, terjadi perubahan yang dramatis di banyak bidang kehidupan sosial di Indonesia. Pasca reformasi penguatan posisi sipil (gerakan kaum Kelas menengah) memiliki pori yang cukup besar dan menjadi kekuatan penyeimbang didalam penumbuhan proses demokrasi sebuah negara. Sementara itu Talshier (Talshier 2005) dalam Artikelnya, memberikan suatu gambaran munculnya Kelas menengah baru yang diharapkan dapat memunculkan bentuk agen perubah. Sementara itu Artikel yang dilakukan Heriyanto dan Hadiz (Heryanto, A. & Hadiz, V.R. 2005) mengemukakan bahwa budaya transaksionalisme, kolusi dan nepotisme terus menjadi menonjol, namun pada prakteknya mereka menjadi terdesentralisasi atau multicentered pasca reformasi.

Ciri-ciri Kelas menengah menurut wiratmo Soekito (Wiratmo 1986) *Pertama*, Memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang mampu diteorisasikan dan direalisasikan di tengah masyarakat; *Kedua*, Dapat berbicara dengan bahasa kaumnya dan mampu menyesuaikan dengan lingkungan; dan *Ketiga*, memiliki tanggung jawab sosial untuk mengubah masyarakat yang statis menjadi dinamis. Diantara yang termasuk dalam unsur

Kelas menengah ini adalah kaum akademisi yang ada di kampus.

Kemudian dalam Artikel yang dilakukan *Dakhidae*¹ memberikan suatu Analisis bahwa Otoritarianisme sistem politik orde baru juga tidak mematikan aktivitas organisasi masyarakat sipil. Artikel yang dilakukan oleh Stanchowicz (Stachowicz-Stanusch 2013) mengungkapkan bahwa sistem politik orde baru justru melahirkan musuhnya sendiri yang bekerja di luar sistem, karena sistem sudah menjadi sinonim dengan negara itu sendiri. Meski berada di bawah tekanan kekuasaan, gerakan masyarakat sipil (kaum Kelas menengah) dalam era ini tetap memainkan perannya. Bahkan, kalau boleh dikatakan, menjadi penyeimbang kekuasaan negara dalam beberapa hal, seperti penyediaan pandangan alternatif mengenai suatu kebijakan. Demokrasi dalam masa post reformasi memicu tumbuhnya keterlibatan peran sipil masyarakat. Gerakan masyarakat sipil terutama kaum Kelas menengah pada era orde baru berujung pada penggulingan pemerintahan Presiden Soekarno (orde lama). Pada tahun 1998 Pada era Orde Baru

Kaum Kelas menengah yang merupakan Aktor di dalam atau diluar pemerintah ini, merupakan perwujudan masyarakat sipil yang peduli terhadap upaya pemberantasan budaya transaksionalisme untuk menuntaskan agenda reformasi di Indonesia (Parris, 2000: 51-56). Hal senada juga di ungkapkan oleh Faqih (Faqih 1992) bahwa pengawal penegakan demokrasi adalah kaum Kelas menengah, di mana kelompok Kelas menengah ini senantiasa mengawal proses demokrasi agar berjalan dinamis dan penuh vitalitas dan mencapai tujuan-tujuannya. Urgensi penguatan peran kaum Kelas menengah adalah sebagai salah satu motor dalam penguatan masyarakat sipil semakin mengemuka disaat negara yang kurang kuat dan korup juga mengharuskan rakyatnya tidak diam dan berpangku tangan namun ikut bekerja untuk mengisi ruang-

ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemerintah. Pertanyaannya bagaimana peran kaum Kelas menengah dalam membangun sebuah gerakan ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme gerakan anti budaya transaksionalisme, dengan cara memegang diametralprofesi ketika dihadapkan dalam gerakan gerakan anti budaya transaksionalisme. Sementara itu menurut Suseno (Suseno 1997) yang dimaksud diametraldalam sebuah etik memberikan sebuah pilihan yang paling terbaik dan terbenar dalam beberapa pilihan paling baik dan benar, kata kuncinya individu dalam memberikan sebuah pilihan paling terbaik dan terbenar harus bernagkat dalam sebuah ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme yang kritis.

Positioning dan Fokus Pembahasan

Pada titik inilah pentingnya dibuat, dengan artikel ini diharapkan mampu menggunakan perspektif teoritik yang dapat memposisikan peran Kelas menengah sebagai individu dalam diametral seorang Kelas menengah yang memegang idealisme dan pragmatism, diharapkan Kelas menengah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk secara otonom dan independen berada dalam pilihan idealisme, menjadi menarik untuk diangkat. Atau dengan kata lain, melihat peran kaum Kelas menengah tidak semata-mata kelompok pragmatisme hanya sebagai “turunan” dari struktur kekuasaan ekonomi dan politik yang melingkupinya, tetapi mampu berpegang teguh pada idealisme dan mampu menepis keinginan yang pragmatisme. seperti yang diungkapkan oleh Said (Edward Said 1998), yang memperkenalkan dan menggunakan konsep peran Kelas menengah harusnya melepaskan diri dari gairah nasionalitas, ras dan kelas, atau dengan kata lain dan ruang pragmatisme, ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme diametral tentang ide hakekat intelektual yang memegang idealism keberpihakan pada ruang kemanusiaan yang

universal harus muncul bukan dari perenungan para ahli-ahli politik dan strategi nasional yang dekat dengan puncak kekuasaan elit, tetapi harus muncul dari dalam hakekat ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme dirinya.

Berawal dari sisi diametral antara idealisme dan pragmatism ini menjadikan letak pentingnya Artikel ini. Selain belum banyak dilakukan, Artikel ini mencoba untuk memaknai dan menemukan ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme peran Kelas menengah di Indonesia pasca reformasi terhadap gerakan anti budaya transaksionalisme, yang bermula dari sebuah ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme diametralindividu dalam etika (konsil) kaum Kelas menengah dimana selalu dihadapkan dalam diametralrealitas sosial dan budaya transaksionalisme yang sistemik. Penggunaan perspektif ini secara tajam mampu melihat bagaimana struktur ekonomi dan politik secara massive mengendalikan atau mengontrol peran kaum Kelas menengah, baik ketika menyangkut kepentingan idealisme keilmuan, kepedulian pada kondisi sosial dalam *Civil Society* atau kepentingan politik tertentu maupun kepentingan elit.

Keterbaruan yang Diharapkan

Artikel ini dimaksudkan bukan hanya untuk sekedar mengaplikasikan teori *C. Wright Mills* dalam *Sociology Imagination* tentang peran kaum Kelas menengah *White Colar Middle clas* di Amerika saat era pasca perang dingin,tetapi lebih jauh dari artikel ini berusaha mencoba memproyeksikan di Indonesia era transisi demokrasi, untuk itulah artikel ini diharapkan mampu memberi gambaran Kelas menengah .Ideologi dan cita-cita *C. Wright Mills* dalam karya fenomenalnya, “*Sociology Imagination*”, membayangkan adanya sosok white collar middle clas muncul sosok, “*Intellectual Craftsmanship*” yaitu seorang Kelas menengah yang memiilki ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme dalam

kecermelangan untuk mengaktualisasikan idealisme sebuah solusi atas perubahan, dalam fenomena permasalahan sosial yang muncul di masyarakat.

Artikel ilmi di ambil dan dikembangkan dari studi disertasi, artikel ini sepertinya tidak melihat lebih jauh tentang gerakan anti budaya transaksionalisme di Indonesia, tapi lebih berfokus pada perdebatan diametral antara idealisme dan pragmatisme di golongan kelas menengah di Indonesia.

Perdebatan Ontologis dan Epistemologis

Sosiolog Amerika ini adalah kelahiran Waco Texas 1918 dikenal pemikirannya seorang yang “Radikal” dalam hal pemikiran dalam mengkritisi kuatnya cengkaman struktur elite yang ada dalam dominasi kuatnya pengaruh pemikiran “Struktural Fungsional” Talcot Parson saat Pasca Perang Dunia I (Mills 1958). Kondisi Amerika serikat waktu itu memasuki fase krisis ekonomi di Amerika Serikat, Sociological Imagination sebagai karya akhir dari C. Wright Mills mampu memberikan pemikiran yang sangat radikal menentang dominasi kuatnya Struktural Fungsional (Mills 1958). Radikalisme pemikiran Mills tertuang dalam *Sociological Imagination*, dalam karya ini seakan Mills menegaskan hendak mengungkap ontologik dan epistemik posisi Kelas menengah yang ada pada masa itu yang lahir dalam struktur baru *The New Class* dalam struktur sosial sebagai middle class group di era kebangkitan Amerika pasca perang dingin dengan Uni soviet (Geary 2009). Sebagai kelas yang baru middle class di Amerika ini disebut sebagai *White Colar Middle Clas* yang menjadi kelompok kelas menengah berperan sangat strategis. Ke strategisan kelas menengah baru di Amerika Serikat ini menjadi kelas yang mampu “bermain dan menyambungkan” antara kepentingan kelas elite dan kelas proletar waktu itu (Mills 1958).

Keunikan pemikiran Mills awalnya bergerak dari sosiologi praktis kemudian bermetamorfosa ke Eropa Klasik (Mills 1958). Metamorfosa pemikiran Mills ini berpengaruh pada konsepsi hadirnya konsepsi *Counciousnes Inner Life White Collar Middle Class*, pada level ontologis dan epistemologi. Konsepsi yang dilahirkan dari *Sociological Imagination* seakan membawa perubahan pemikiran ontologis bergerak dalam hakekat kehidupan yang mampu mengungkapkan ruang epistemik dimasa kini dan lebih berfokus dan berangkat dari kemampuan menangkap sejarah masa lalu yang sangat menentukan bagi keberadaan individu masa kini (Wright Mills 2013). Kritik pemikiran oleh kelompok akademisi seteru Mills, Kritik seteru Milss ini memuncak saat Mills didesak lebih jelas kriteria individu yang dimaksudkan. Individu yang dimaksud adalah *Intellectual Craftsmanship di Amerika Serikat* pasca perang dingin. Konsep yang mendasar di sampaikan oleh C. Wright Mills menempatkan 6 konsep kunci Berupa *Personal Troubels, Public Issue, Eksternal Career, Inner Life, Macroscopic dan Moleculer* (Wright Mills 2013).

Fokus Perdebatan Positioning Kelas Menengah

Dalam Artikel ini penulis hendak berfokus pada perdebatan *Inner life dan Eksternal Career* dalam realitas sosial di Indonesia. Di Indonesia sendiri kelas menengah masih mengundang banyak perdebatan yang berkepanjangan, dimana sampai saat ini masih pada era transisi demografi. Era transisi demokrasi di Indonesia saat ini masih mengundang perdebatan yang cukup tajam dimana relasi antara Negara, Masyarakat dan Kelompok Kelas menengah terdidik menjadi menarik untuk diperdebatkan dalam sisi peran serta keberadaanya. Dalam bukunya tentang ideologi dan Utopia menjelaskan bahwa bukanlah salah satu kelas di atas, karena kaum Kelas menengah malah dapat berperan

melampaui batas dalam sebuah kelas *Karl Manheim*(Mannheim 1993), relasi yang dimaksud adalah pada ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme peran kaum Kelas menengah yang sangat sentral, seperti yang dikatakan oleh Benda (Benda 1999). Ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme peran Kelas menengah dalam hal ini lebih kepada perannya sebagai agen perubah dalam membangun negara, dengan melaksanakan ide-ide yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara pada sisi yang lain ide-ide yang lain dapat pula menjadi sumber permasalahan dan kerusakan. Dalam Buku "*Prisoner of Notebook*", *Antonio Gramsci* (Gramsci 1929) menggolongkan Kelas menengah menjadi Kelas menengah organik dan klasik. seakan memberikan peringatan bahwa kelas menengah Kelas menengah menjadi sosok yang samar tapi mempunyai peran yang sangat besar. Peran yang besar disini sepertinya menegaskan bahwa kelas menengah memiliki posisi yang strategis mampu menjadi penghubung dari kelas elit dan kelas proletar. Pendapat tiga tokoh diatas seakan menegaskan menegaskan identitas kelas menengah sangat dilematis dan diametral pilihan menjadi kelompok yang berada dalam peran idealisme atau pragmatisme. Perdebatan yang cukup panjang siapakah kelas menengah di Indonesia sudah muncul kepermukaan sejak tahun 1980 an. Tulisan yang menarik disajikan oleh *Ariel Heriyanto* memberikan sebuah sinyal bahwasannya kelas menengah sampai saat ini masih belum jelas dalam struktur sosial, kesamaran sosok kelas menengah ini di tulis dalam buku "Bukan Ratu Adil" (Heryanto, A. & Hadiz, V.R. 2005), Sejalan dengan pemikiran *Ariel Heriyanto* seolah menegaskan tentang peran kelas menengah, penegasan yang sama diungkap oleh *Daniel Dhakidae* (Daniel Dhakidae 2003) bahwa kebangkitan peran kelas menengah di Indonesia di Era Orde baru muncul adanya program marshal plan dari pemerintah Orde baru. Pemikiran Dhaniel Dhakidae sepertinya

sejalan dengan *Ariel Hariyanto* bahwa kelas menengah berada dalam diametral pilihan antara idealisme dan pragmatisme. Pertanyaan menarik yang ada sekarang ini apakah di era milenial apakah Kelas menengah mampu memisahkan diri antara hakekat kehidupan Kelas menengah yang memegang teguh idealisme ataupun memilih menjadi kelompok pragmatisme atau Kelas menengah "pesanan". Pilihan pragmatisme inilah yang menempatkan diri pada Kelas menengah yang budaya transaksionalisme. Budaya transaksionalisme berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, sehingga dibutuhkan pencegahan dan penindakan yang sangat sistemik dengan pola jaringan yang sangat variatif menurut *Ackerman* (Rose-Ackerman 1999) mengatakan, kajian ini bertumpu pada pendekatan aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Sejalan dengan pemikiran di atas Artikel yang dikemukakan *Jhon S.T Quah* (Quah 1997) menyarankan, pemberantasan budaya transaksionalisme yang dirumuskan dalam strategi pemberantasan budaya transaksionalisme, berbentuk piramida, yang pada puncaknya adalah prevensi (pencerahan), sedangkan di kedua sisinya masing-masing adalah pendidikan masyarakat (public education) dan pemidanaan (punishment) seperti pada negara-negara Afrika bagian selatan.

Sementara beberapa Artikel tentang kekuasaan *Oligarchi rezim Orde Baru* di Indonesia yang dikemukakan oleh *Dhakidae* (2012), *Heriyanto dan Hadist* (Heryanto, A. & Hadiz, V.R. 2005), serta *Gingerich* (Gingerich 2014), yang berfokus pada pengawasan dan penegakan *Civil Society* antara birokrat, pengusaha dan militer menjadi sebuah gerakan penyadaran melawan budaya transaksionalisme yang di wariskan oleh *Rezim Orde baru*.

Studi ini pada posisi tidak hanya menerima konsepsi tentang *Sociological Imagination* tentang peran *Inttellectual Craftmanship* tetapi juga berusaha mengembangkannya dengan situasi dan

kondisi serta jenis realitas yang berbeda, yaitu: di Indonesia. Problem situasional peran Kelas menengah yang berada pada transisi demokrasi memasuki 10 (sepuluh) tahun reformasi dan memasuki era milenial.

Bahkan lebih jauh dari itu, studi ini berupaya untuk dapat memberikan gambaran yang dapat menitik tajam dalam menganalisis sebuah realitas sosial khususnya dalam persoalan budaya transaksionalisme, serta dapat membongkar lebih jauh motif dan makna individu sebuah kelompok Kelas menengah itu sendiri, mengapa mereka memilih menjadi kelompok Kelas menengah yang anti budaya transaksionalisme, baik ketika mereka berada pada gerakan anti budaya transaksionalisme maupun ketika mereka memasuki sistem kekuasaan maupun politik.

Budaya Transaksionalisme Kelas Menengah

Dalam pertarungan peran Kelas menengah di Indonesia pada masa reformasi seperti sekarang ini, ada sebuah era transisi demokrasi, di mana proses transisi menuju demokrasi ditandai oleh pergeseran kekuasaan dari militer ke politisi sipil hasil pemilu. Pertarungan peran Kelas menengah pada masa era transisi demokrasi sampai era milenial saat ini sangat krusial karena ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme dilematis anti budaya transaksionalisme menjadi sebuah cerminan ketika kita hendak menyorot bentuk perlawanan Kelas menengah.

Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan yang muncul di awal, tentang bagaimanakah bentuk keragaman pengalaman tentang ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme para Kelas menengah dalam menghadapi tekanan dilema etik dalam gerakan anti budaya transaksionalisme di Indonesia, studi ini menemukan tentang adanya ragam makna ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme pengalaman yang muncul dan dialami oleh para Kelas menengah, yang pada dasarnya bentuk keragaman itu dimulai dari ketika para intelektual tersebut “memilih” tempat untuk beraktivitas, di mana kelompok pertama

memilih tempat beraktivitas di tempat kegiatan di lembaga yang anti budaya transaksionalisme dan kelompok yang lain memilih tempat beraktivitas dalam kekuasaan dan politik.

Selanjutnya kedua tempat beraktivitas tersebut memunculkan bentuk keragaman lain, yakni: mereka yang selalu dihadapkan pada sebuah pilihan mana yang paling benar dari yang terbaik, dan mana yang harus didahulukan antara kepentingan pribadi dalam keluarga untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau peran publik ketika mereka bekerja di lembaga anti budaya transaksionalisme. Selain itu dilema etik juga dialami oleh kelompok aktivis anti budaya transaksionalisme, di mana mereka selalu dalam posisi yang terasing (teralienasi) dalam pergaulan sosial di masyarakat atau bahkan oleh anggota keluarganya sendiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini memilih menggunakan Fenomenologi *Alfreds Schutz*. Argumentasi yang mendasarinya selain level ontologi berasal dari filsafat *Cartesian*. Pada level epistemologi antara kesamaan akar pemikiran konsepsi *C. Wright Mills dan Alfred Schutz* dari *Max weber* tentang tindakan sosial. Tindakan Sosial adalah sebuah pengalaman dalam sebuah realitas sosial subyek yang pengamatan.

Studi fenomenologi Alfred Schutz mengawalinya dengan mengawinkan fenomenologi transendental-nya Husserl dan Heidegger dengan konsep *Verstehen* yang merupakan buah pemikiran Max Weber. Jika Husserl hanya memandang filsafat fenomenologi (transendental) sebagai metode analisis yang digunakan untuk mengkaji ‘sesuatu yang muncul’, mengkaji fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tetapi Schutz melihat secara jelas implikasi sosiologisnya didalam analisis ilmu pengetahuan, berbagai gagasan dan ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme. *Schutz* mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan ruang diametral antara idealisme dan

pragmatisme. Inti dari pemikiran fenomenologi *Schutz* adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran bahwa pengalaman adalah sebuah tindakan sosial yang memiliki pemaknaan, dunia pemaknaan *Alfred Schutz* sebagai realitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya transaksional kelas menengah terbagi menjadi **kelompok varian intelektual yang masuk sistem** dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) kelompok: yang **pertama**, kelompok intelektual yang memiliki **ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme melawan budaya transaksionalisme** sudah teruji dan memiliki integritas, di mana mereka masuk dalam sistem tapi selalu dapat menjaga integritasnya untuk tidak melakukan budaya transaksionalisme; dan yang **kedua** adalah **ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme intelektual yang belum teruji integritasnya**. Untuk kelompok kedua ini ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme ini dibagi dalam 3 (tiga):

Ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme yang pertama, ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme kelompok intelektual yang berada dalam sistem baik itu pemerintahan dan politik, ketika masuk dalam sistem, ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme kelompok ini mengetahui serta menjumpai beberapa budaya transaksionalisme yang dilakukan di lingkungan tempat mereka bekerja. Walaupun kelompok ini tidak ikut budaya transaksionalisme tersebut tetapi bentuk ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme mereka telah membiarkan saja budaya transaksionalisme terjadi, karena masih ingin bertahan bekerja di tempat tersebut, demi pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya dan tetap ingin mengisi tempat tersebut dengan orang yang semacam dia, setidaknya untuk mengurangi orang yang budaya transaksionalisme di lingkungan tempat kerja mereka.

Ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme yang kedua yaitu ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme

intelektual yang memiliki kesamaan dengan kelompok kecil yang pertama, tetapi ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme ini malah dipakai untuk membangun ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme di mana mereka beberapa “permufakatan budaya transaksionalisme” untuk mencoba mensiasati sistem anti budaya transaksionalisme menjadi budaya transaksionalisme yang bersistem, artinya disini ada kesengajaan menggunakan kekuasaannya.

Ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme yang ketiga yaitu ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme intelektual yang memang sudah memilih jalan di jalur menjadi koruptor, ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme ini muncul ketika mereka mempunyai kebutuhan untuk mengumpulkan tabungan sebagai bekal pensiunnya jika nanti sudah tidak lagi bekerja.

Intelektual yang dikatakan menjadi koruptor dan berperilaku koruptif adalah ketika kelompok intelektual ini mencampurkan antara kepentingan individu dengan kepentingan publik dengan berbagai variasi, yakni: yang tetap dapat memisahkan dilemma etik dengan tegas dan mampu mencegah lingkungannya melakukan budaya transaksionalisme, yang tidak melakukan budaya transaksionalisme (dapat memisahkan dilemma etis) tapi tidak mampu mencegah lingkungannya dan yang tidak mampu memisahkan dilemma etisnya dalam arti telah melakukan budaya transaksionalisme. Berikut beberapa hal yang juga berhasil dirumuskan dalam studi ini:

Pertama, keterlibatan kelompok intelektual dalam kegiatan organisasi anti budaya transaksionalisme tidak murni hanya sebuah kegiatan untuk menempatkan peran idealisme kelompok intelektual yang selalu konsisten melawan budaya transaksionalisme saja; tetapi ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme intersubjektifitas yang muncul dari keterlibatan intelektual anti budaya transaksionalisme adalah ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme yang bervariasi pula, di mana ada yang ruang diametral antara idealisme dan

pragmatismenya memang muncul sejak awal, sejak dalam pendidikan, namun ada pula yang ruang diametral antara idealisme dan pragmatismenya muncul secara bersamaan dengan masuknya mereka ke dalam organisasi anti budaya transaksionalisme.

Kedua, ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme anti budaya transaksionalisme yang dimiliki oleh kelompok intelektual yang aktif dalam gerakan anti budaya transaksionalisme tidak lepas dari aspek pengalaman kesejarahan individu (*life history*) yang tumbuh dari keluarganya. Meskipun demikian mereka juga tetap menghadapi dilema etis yang bersifat personal, di mana keluarga tidak seluruhnya masih memegang idealisme dan menyetujui mereka untuk bekerja di lembaga anti budaya transaksionalisme.

Ketiga, hakekatnya orang yang budaya transaksionalisme di samping mendapatkan rasa nyaman, juga akan membawa kepuasan bagi hasrat narsistik, yaitu apabila sang ego dikenali, dikagumi, dan bahkan dicintai oleh orang lain karena pemenuhan kekayaan berlebih dibandingkan yang lain. Yang sangat penting disini adalah hasrat pengakuan berkuasa, yang dari semua ini disebut sebagai sebuah ego identitas.

Keempat, kebutuhan hidup individu adalah bagian penting dalam keluarga, oleh karena itu dukungan dari keluarga terutama dalam keluarga inti dari aktivis anti budaya transaksionalisme sangat dibutuhkan.

Kelima, penyebab perilaku budaya transaksionalisme dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu penyebab eksternal dan internal. Penyebab eksternal yang bersifat penarik adalah lingkungan, di mana seseorang melakukan kegiatan, baik saat menempuh pendidikan maupun saat bekerja, yang menstimulasi individu melakukan perilaku budaya transaksionalisme, dan penyebab internalnya adalah kehidupan diri dan keluarga yang merupakan sifat pendorong untuk melakukan budaya transaksionalisme.

Keenam, makroskopik dalam sebuah sistem memberikan sebuah konsepsi pendekatan yang sifatnya memaksa dan represif di mana gerakan anti budaya transaksionalisme di Indonesia sebagai akibat

dari sistem yang koruptif, selama ini dengan langkah-langkah represif sebenarnya hanyalah sebuah upaya mematikan akibat dari sistem yang koruptif tersebut dan sama sekali tidak menghapuskan penyebabnya. Oleh karena itu hasil studi menunjukkan bahwa lebih efisien dan efektif menghilangkan penyebabnya dari pada “mengobati” penyakitnya (*prevention is better than cure*).

Ketujuh, memaknai pengalaman. Ini adalah sebuah teknik dalam upaya untuk memahami ruang diametral antara idealisme dan pragmatisme dari intersubjektifitas (Wallace, 1994: 137), dan pemaknaan pengalaman biasanya dilakukan dengan menelusuri perjalanan hidup. Membangun sebuah konsep dalam memahami dan memaknai pengalaman dari subyek dalam studi yang dilakukan ini menjadi penting karena dapat menemukan latar belakang pemikiran dari subyek tersebut.

Kedelapan, hampir semua praktek budaya transaksionalisme dilandasi rendahnya integritas dan nilai etika. Etika dalam hal ini berarti bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang bermoral. Studi ini menemukan bahwa beberapa subyek penelitian masuk dalam kelompok yang sebenarnya mereka memang mengetahui dan memahami apa yang dilakukannya adalah budaya transaksionalisme dan tahu besarnya resiko yang dihadapi saat sebagai pejabat negara, tetapi mereka tetap saja melakukannya karena disebabkan oleh karena adanya ruang untuk budaya transaksionalisme, bahkan menjadi aktor utama perilaku korup. Walaupun tidak semua bermuara pada pemenuhan kebutuhan dengan ukuran finansial tapi memiliki segenggam kekuasaan yang mendapatkan pengakuan mendapatkan banyak penghormatan karena menjadi pejabat negara adalah bagian lain pintu awal dalam melegitimasi kekuasaan dan cenderung mempertahankannya dalam jangka waktu lama yang akhirnya absolut.

KESIMPULAN

Studi ini kemudian secara ekplisit menemukan bahwa kaum intelektual dalam **kelompok besar pertama** menjadi kelompok

terdepan dalam membangun kesadaran anti budaya transaksionalisme walaupun harus berhadapan dengan resiko terkucilkan, sendiri, sunyi dan tidak populer. Pola asuh antibudaya transaksionalisme ini lebih lengkap bila diimbangi dengan sikap hidup sederhana meskipun serba ada.

Benang merah antara pendidikan karakter dan pendidikan antibudaya transaksionalisme. Keduanya memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya bahwa nilai-nilai pendidikan antibudaya transaksionalisme merupakan bagian dari pendidikan karakter. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan antibudaya transaksionalisme harus ditumbuhkan sejak dini, dalam pendidikan formal sebagai upaya pencegahan tindakan-tindakan koruptif. Upaya pencegahan budaya budaya transaksionalisme di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental budaya transaksionalisme pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antibudaya transaksionalisme yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antibudaya transaksionalisme melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Pendidikan antibudaya transaksionalisme merupakan usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pengenalan nilai-nilai antibudaya transaksionalisme (*knowing*), penghayatan nilai-nilai antibudaya transaksionalisme (*feeling*), pengamalan nilai-nilai antibudaya transaksionalisme dalam kehidupan sehari-hari (*action*) dan pencegahan terjadinya perbuatan budaya transaksionalisme yang dilakukan melalui pendidikan formal (sekolah), pendidikan informal (keluarga) dan

pendidikan nonformal.

Konsep diri merupakan konsep yang lumer karena “diri” tampaknya tidak dapat dianggap secara sederhana sebagai objek untuk suatu penjelasan yang sifatnya deskriptif. Dengan adanya aneka perjalanan dan pengalaman hidup, sulit menjelaskan apakah diriku ini tetap sama selamanya atautkah ada perbedaan antara diriku saat ini dan diriku sepuluh tahun yang lalu. Kalau berbeda, lalu siapakah diriku ini? Sepertinya diri bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu hasil dari proses pembentukan yang berlangsung terus-menerus, oleh karena itu, diri lebih tepat dipahami secara evaluatif sebagai sesuatu yang menjadi (*becoming*), “menjadi diri” dengan melakukan perbuatan-perbuatan untuk mewujudkannya karena ada nilai lebih yang akan diperoleh di dalamnya. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukannya adalah tindakan moral atau tindakan berkeutamaan, sedangkan diri yang mau diwujudkannya adalah diri dari sosok individu yang mengidentifikasi dirinya dengan intelektual ideal. Konsep diri yang dirujuk di sini disebut konsep “diri yang diperluas” (*the expanded self*). Artinya, orang berkeutamaan (*virtuous man*) akan menempatkan seorang teman sebagai “diri yang lain” (*another self*) seakan-akan diri yang sesungguhnya lebih luas dari pada batas diri yang alami. Pertemanan yang baik (*virtuous friendship*) mengatasi batas terpisahnya individu satu dengan individu lain sedemikian rupa sehingga ada suatu persatuan antara diri dan diri-yang-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda, Julian Hary. 1999. “Pengkhiatanan Kaum Cendekiawan, Terj. Winarsih P. Arifin, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.” “*Pengkhiatanan Kaum Cendekiawan, Terj. Winarsih P. Arifin, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.*”
- Daniel Dhakidae. 2003. “Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, Jakarta: PT Gramedia Pustaka

- Utama, Hal 62.”
- Edward Said. 1998. “Peran Kaum Intelektual: Kuliah-Kuliah Reith Tahun 1993, Diterjemahkan Oleh Rin Hindryati P. Dan P. Hasudungan Sirait, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal. 33.” *Edward Said. 1998. “Peran Kaum Intelektual: Kuliah-Kuliah Reith Tahun 1993, Diterjemahkan Oleh Rin Hindryati P. Dan P. Hasudungan Sirait, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal. 33.”*
- Faqih, Mansour. 1992. “Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik, Yogyakarta: INSIST.” *Faqih, Mansour. “Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik, Yogyakarta: INSIST.”*
- Geary, Daniel. 2009. *Radical Ambition, C. Wright Mills, the Left, and American Social Thought*. Gingerich, D. W. 2014. “Yesterday’s Heroes, Today’s Villains: Ideology, Corruption, and Democratic Performance.” *Journal of Theoretical Politics* 26(2): 249–82. <http://jtp.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0951629813495120>.
- Gramsci, Antonio. 1929. “Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Available at London Publish 1929.” *Gramsci, Antonio. 1929. “Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Available at London Publish 1929.”*
- Heryanto, A. & Hadiz, V.R. 2005. “Post-Authoritarian Indonesia. Critical Asian Studies, 37(2), Pp.251–275.”
- Jefrey winters. 1988. “No Title.” *Indonesia: The Rise of Capital Review* 45(Apr., 1988): 109–128.
- Kurzsmann, C & Owens lins. 1993. “The Sociology of Intellectuals. Theory, Culture & Society, 10(3), Pp.69–80.”
- Mannheim, K. 1993. “The Sociology of Intellectuals.” *Theory, Culture & Society* 10(3): 69–80. Mills, C. Wright. 1958. “The Structure of Power in American Society.” *The British Journal of Sociology* 9(1): 29–41.
- Quah, Jon S T. 1997. “Corruption In Asian Countries: Can It Be Minimized?” II(1). Rose-Ackerman, Susan. 1999. “Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform.” *Ch 4 Reducing Incentives and Increasing Costs*: 263. <http://www.loc.gov/catdir/description/cam029/98043631.html>.
- Stachowicz-Stanusch, Agata. 2013. “Relationship Between National Intellectual Capital and Corruption: Cross National Studies.”
- Suseno, F M. 1997. “13 Tokoh Etika Sejak Jaman Yunani Sampai Abad Ke 19, Yogyakarta: Kanisius,.”
- Talshier, G. 2005. “Intellectual as a Political Actor? Four Models of Theory / Praxis.” Wiratmo, S. 1986. “Cendekiawan Dan Politik Penerbit LP3ES, Jakarta.”
- Wright Mills, C. 2013. *The Sociological Imagination, Contemporary Perspective*. Contempora. ed. Ann Nilsen Scoot John. United Kingdom.
- . 2014. “C. Wright Mills, the Power and Power of the Elite - a Reassessment.”